

Pengelolaan BUMDES Harapan Berkembang Kabupaten Tegal

Ghea Dwi Rahmadiane^{1*}, Bahri Kamal²

^{1,2})Politeknik Harapan Bersama, Indonesia

¹)ghea.dwi@poltektegal.ac.id, ²)bahrikamal17@gmail.com

Corresponding Author

Diajukan : 22 Agustus 2023

Disetujui : 29 Agustus 2023

Dipublikasi : 1 Januari 2024

ABSTRACT

To encourage the realization of community participation, Bumdes administrators and village government must work together in planning programs and still consider existing social values, so that in carrying out development programs it can provide welfare to the community and be able to create strong community participation in Bumdes management. The purpose of this study was to determine community participation and its inhibiting factors in the management of Bumdes Harapan Berkembang. In this study using descriptive statistical analysis. The population in this study were Village Officials, Bumdes Management, and the people in the East Mejasem Village. The sample in this study was determined using the sampling technique used was purposive sampling, where samples were taken based on certain criteria. After analyzed with Cohen and Uphoff's theory which shows community participation in management activities, namely participation in planning, participation in implementation, participation in benefits, and participation in evaluation, it can be seen that community participation in Bumdes management was at the Degrees of Citizen Powers or Partnership, namely Bumdes Harapan Berkembang has achieved citizen power, so that at this level multi-stakeholder cooperation formed in formulating or implementing policies and programs. According to Arnstein, new participation really occurs when people have sufficient levels of wealth and the highest level of people's sovereignty was the occurrence of social control and citizen control in which important decisions and controllers of development in the hands of the people. There were factors that hinder the successful management of Bumdes Harapan Berkembang, namely internal and external factors.

Keywords: BUMDES management; community participation; Degrees of Citizen Powers

PENDAHULUAN

Partisipasi masyarakat acapkali dibicarakan di berbagai daerah, baik di perkotaan maupun pedesaan, karena kita dapat melihat seberapa besar dampak dari partisipasi masyarakat, partisipasi ini menentukan kesuksesan suatu rencana atau program di sekitarnya, kesuksesan suatu program tanpa keterlibatan masyarakat tidak bisa berjalan dengan optimal, maka diperlukan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan atau program, agar program dapat berjalan dengan baik (Savitri et al., 2022). Program-program yang telah direncanakan berkaitan dengan pembangunan masyarakat, sehingga sangat penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan tersebut (Abrar et al., 2021).

Perencanaan partisipatif merupakan rencana yang melibatkan seluruh masyarakat dalam mencari solusi atas pemecahan masalah yang perlu dihadapi untuk mencapai kondisi yang diinginkan, dalam tujuan dan prosesnya dengan partisipasi masyarakat, dan bermanfaat baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai satu kesatuan masyarakat (Maros et al., 2020). Adapun yang menjadi titik fokus dalam riset ini merupakan faktor penghambat dalam

pelaksanaan partisipasi masyarakat di Bumdes Harapan Berkembang Kabupaten Tegal antara lain faktor internal dan faktor eksternal.

Pengelolaan Bumdes bukan hanya mewadahi usaha perekonomian desa namun juga sebagai implikasi dari pendekatan pemberdayaan masyarakat (Agustin & Mustoffa, 2023). Soetomo (Soetomo, 2018) mengatakan bahwa hadirnya pemberdayaan masyarakat menjadi suatu pendekatan yang memberikan kesempatan dan kewenangan yang lebih besar kepada masyarakat, khususnya masyarakat setempat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan proses pembangunan. Oleh karena itu, tujuan Badan Usaha Desa untuk meningkatkan perekonomian desa, seperti Kementerian Desa, Pembangunan dan Migrasi Daerah Terdegradasi Republik Indonesia, dapat dicapai dengan partisipasi masyarakat (Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2017).

Bumdes Harapan Berkembang merupakan Badan Usaha Milik Desa yang dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat Mejasem Timur, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Bumdes Harapan Berkembang berdiri sejak 2020 dengan unit usaha peternakan kambing, sewa ruko, sembako murah, dan pengelolaan sampah. Peneliti tertarik untuk meneliti Bumdes Harapan Berkembang Kabupaten Tegal karena berdasarkan observasi yang telah dilakukan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Bumdes masih belum optimal karena sejak awal berdiri sampai tahun 2022 pengelolaan unit usaha mengalami kerugian, pengurus tidak aktif dalam mengelola unit bisnis, dan modal habis untuk kegiatan operasional. Hal tersebut memunculkan masalah yang menarik untuk dikaji, yaitu bagaimana partisipasi masyarakat pada pengelolaan Bumdes Harapan Berkembang bisa terealisasi sebagaimana mestinya. Kapasitas Kepala Desa juga penting untuk mempengaruhi masyarakat agar masyarakat lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam pembangunan Desa (Ali et al., 2019). Untuk mendorong partisipasi masyarakat, perangkat desa harus mampu menciptakan sinergi dalam perencanaan program dengan tetap memperhatikan nilai-nilai sosial yang ada. Sehingga dalam pelaksanaan program pembangunan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan dapat menciptakan partisipasi masyarakat yang kuat dalam pengelolaan Bumdes (Hendrawati & Mira Pramudianti, 2020).

Tujuan penelitian yaitu untuk mendapatkan gambaran secara deskriptif mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Bumdes Harapan Berkembang Kabupaten Tegal dan mengetahui faktor penghambat terjadinya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan Bumdes Harapan Berkembang Kabupaten Tegal. Teori utama (*grand theory*) yang dijadikan dasar dalam riset ini adalah Teori Cohen dan Uphoff yang menggambarkan tentang adanya 4 (empat) jenis kegiatan yang memperlihatkan partisipasi masyarakat di dalam kegiatan pembangunan, yaitu partisipasi dalam perencanaan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam Benefit (pemanfaatan hasil-hasil), dan partisipasi dalam evaluasi. Menurut Arnstein, partisipasi baru benar-benar terjadi bila memiliki kadar kedaulatan rakyat yang cukup dan kadar kedaulatan rakyat tertinggi adalah terjadinya kontrol sosial (*social control and citizen control*) dimana keputusan penting dan partisipasi dalam pengelolaan ada di tangan rakyat. Penelitian ini menjadi berbeda dari penelitian sebelumnya yang lebih kepada pembangunan daerah seperti pada penelitian Meray, et al (Josie Gerald Meray et al., 2016) dan Harfis H., et al (Harfis et al., 2019), maka penelitian ini mengacu pada permasalahan yang ada maka teori utama akan diterapkan pada analisa partisipasi masyarakat pada pengelolaan Bumdes.

STUDI LITERATUR

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Meray, et al (Josie Gerald Meray et al., 2016) dalam artikel yang berjudul Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembang Pariwisata Pantai Mahembang Kecamatan Kakas menganalisis tentang partisipasi masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan. Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama melibatkan partisipasi masyarakat dan perbedaannya penelitian ini menggunakan metode kuantitatif-kualitatif, sedangkan penulis menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa 30 responden dengan presentase 100% menyadari atas pengembangan kawasan pantai Mahembang dapat menciptakan lapangan kerja dan menambah penghasilan masyarakat di sekitar. Partisipasi masyarakat kawasan pantai Mahembang

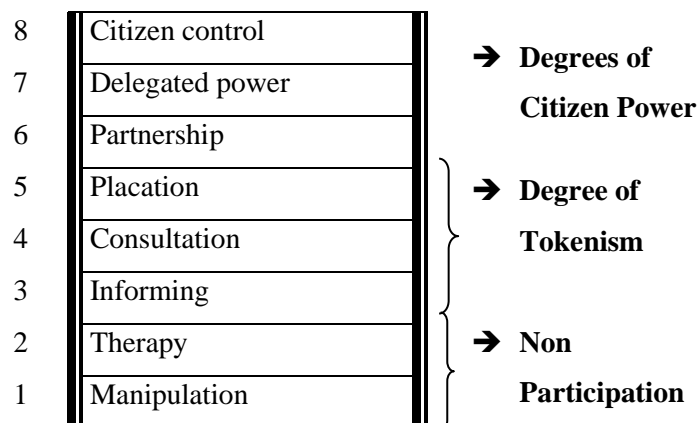
dapat ditunjukkan dalam tingkat partisipasi tenaga (insentif), keterampilan dan kemahiran (inisiatif), dan buah pikiran (interaktif).

Penelitian Tiballa (Tiballa, 2017) dalam artikel yang berjudul Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Swarga Bara Kabupaten Kutai Timur mendeskripsika tentang partisipasi masyarakat dalam Bumdes. Penelitian ini menguraikan tentang faktor-faktor penghambat partisipasi masyarakat. Dalam penelitian ini disebutkan pula tentang partisipasi masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi program-program dari Bumdes. Metode yang digunakan dalam penelitian deksriptif kualitatif.

Penelitian Harfis H., et al (Harfis et al., 2019) yang berjudul Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa menyampaikan bahwa faktor penghambat yang ditemukan kurangnya keterlibatan dalam mengamankan, memelihara dan memanfaatkan hasil pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Teori Yadav dalam Theresia (Aprilia Theresia, 2014) digunakan dalam melihat kegiatan partisipasi masyarakat, yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan, partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan dan partisipasi dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan. Populasi melibatkan seluruh Perangkat Desa dan masyarakat. Teknik penentuan sampel Perangkat Desa digunakan metode Sensus dan masyarakat teknik Purposive Sampling. Pengumpulan data dengan angket dan wawancara, analisa data dengan teknik pengukuran Rating Scale.

METODE

Data primer didapatkan secara langsung dari narasumber melalui jawaban wawancara mengenai partisipasi masyarakat dan faktor-faktor penghambatnya dalam pengelolaan Bumdes Harapan Berkembang Kabupaten Tegal. Populasi dalam penelitian ini yaitu Perangkat Desa, Pengurus Bumdes, dan masyarakat yang ada di Desa Mejasem Timur. Sampel dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik penentuan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, dimana sampel diambil berdasarkan kriteria-kriteria tertentu (Sugiyono, 2014), antara lain Perangkat Desa yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BumDes) Harapan Berkembang Kabupaten Tegal, Masyarakat yang secara aktif terlibat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BumDes) Harapan Berkembang Kabupaten Tegal, dan Masyarakat yang hadir dalam Musdes Badan Usaha Milik Desa (BumDes) Harapan Berkembang Kabupaten Tegal. Sampel yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Pengurus Bumdes, dan Tokoh Masyarakat di Desa Mejasem Timur, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *nonprobability sampling* yaitu *snowball sampling*. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif mengacu pada Teori Cohen dan Uphoff dengan membandingkan tangga partisipasi sebagai berikut:



Gambar 1. Tangga Partisipasi Arnstein
Sumber gambar : Tiballa (Tiballa, 2017)

HASIL

Desa Mejasem Timur merupakan desa yang cukup maju dalam ruang lingkup perekonomian. Mata pencaharian masyarakat desa dominan dengan pertanian, tidak heran jika banyaknya persawahan di wilayah Desa Mejasem Timur. Pendirian Badan Usaha Milik Desa diadakan oleh pemerintah desa. Sedangkan kepemilikan modal dan pengelolaan usahanya diselenggarakan bersama oleh pemerintah desa dan masyarakat. Bumdes Harapan Berkembang berdiri sejak tahun 2020 Modal awal yang diterima Bumdes Harapan Berkembang Mejasem Timur di tahun 2020 senilai Rp 20.000.000,- dan di tahun 2021 Bumdes Harapan Berkembang mendapatkan tambahan modal senilai Rp 75.000.000,-. Dalam berjalannya waktu usaha yang dilakukan oleh Bumdes Harapan Berkembang dalam mengelola modal yang ada menemui beberapa kendala sesuai yang dinyatakan oleh salah satu pengurus Bumdes Harapan Berkembang menyatakan bahwa:

“Di awal pembentukan Bumdes, masyarakat kurang tertarik dengan Bumdes. Rapat diundang tidak datang dan sibuk bertani, kerja, dan aktivitas lainnya. Setelah pengelolaan dan hasil seperti ini ya baru terasa dan meragukan kinerja pengurus.”

Koordinator pengurus Bumdes Harapan Bersama juga menyampaikan bahwa selain kendala dari sumber daya manusia, faktor lain juga mempengaruhi pengelolaan Bumdes, hal tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut:

“Pengurus juga memiliki kegiatan pekerjaan di luar pengelolaan Bumdes, keterbatasan keahlian pengurus dalam mengelola dan mencatat laporan keuangan, namun memang yang utama peran masyarakat.”

Sejak pengelolaan modal awal, unit usaha yang ada di Bumdes Harapan Berkembang antara lain peternakan kambing, sewa ruko, sembako murah, pengelolaan sampah. Masalah yang dihadapi masing-masing unit yaitu salah satunya pada unit peternakan kambing mengalami kegagalan dikarenakan kambing yang ada pada peternakan mengalami sakit atau terserang hama yang mengakibatkan kambing tersebut mati. Pada awal pembelian terdapat 8 (delapan) ekor kambing dan setelah berjalannya waktu ada beberapa kambing yang mati yaitu sejumlah 7 (tujuh) ekor karena terserang penyakit, selain itu kendala yang dihadapi yaitu pada awal pembelian kambing mendekati Hari Raya Idul Adha dan secara otomatis harga kambing pada saat itu sedang naik. Hal tersebut mengakibatkan kerugian yang dialami unit peternakan kambing Bumdes Harapan Berkembang semakin tinggi. Kini sisa kambing yang ada hanya 1 ekor dan dititipkan pada peternak kambing yang ada di Desa Mejasem Timur.

Pada kegiatan sembako murah juga mengalami beberapa masalah yaitu di antaranya, pihak Bumdes akan mengadakan kegiatan sembako murah untuk warga, tetapi kegiatan tersebut dilakukan secara mendadak dan hal tersebut membuat proses pembelian bahan-bahan sembako dilakukan tidak sesuai dengan perhitungan harga yang akan dijual, dengan kata lain melakukan pembelian di tempat swalayan yang harganya lebih mahal. Ketika dilaksanakan program kegiatan tersebut, yang dihasilkan hanya kerugian yang didapatkan. Jumlah dana yang dibelanjakan lebih besar dari jumlah dana yang didapatkan dari hasil penjualan sembako murah. Setelah dipertimbangkan karena tidak ingin menyaingi warga yang ada di Desa Mejasem Timur, maka kegiatan tersebut hanya dilakukan satu kali.

Pada unit pengelolaan sampah Bumdes Harapan Berkembang juga mengalami beberapa kendala antara lain yaitu menumpuknya sampah yang berada di TPS yang berlokasi di dekat Balai Desa Mejasem Timur yang diakibatkan oleh banyaknya sampah yang ada di masyarakat sedangkan truk pengangkut sampah dari DLH sering tidak datang sesuai jadwal yang sudah ada. Sampah yang dibuang di tempat pembuangan sampah bukan hanya sampah rumah tangga saja, pembongkaran sampah ketika di tempat pembuangan sampah tidak tertib sehingga sampah melebar kemana-mana. Besaran iuran masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah tidak dapat menutupi semua dana operasional yang digunakan di unit pengelolaan sampah. Iuran yang didapat dari masyarakat hanya sebesar Rp10.000,- per rumah.

Bumdes Harapan Berkembang dari awal kegiatan sampai lebih dari satu tahun belum melakukan pelaporan pertanggungjawaban atas dana yang digunakan ke pihak pemberi modal, dalam hal ini tentunya pemerintah Desa Mejasem Timur sebagai penanggung jawab modal yang harus mendapatkan akses atau hasil pertanggungjawaban dari semua dana atau modal yang sudah diberikan. Tetapi karena adanya kurangnya pengetahuan sumber daya manusia yang ada serta

kurangnya pengalaman yang ada, maka proses penyusunan laporan pertanggungjawaban atas dana yang sudah dikelola bisa dikatakan sangat jauh dari target yang diharapkan. Selama hampir satu tahun bahkan lebih belum berhasil menyusun laporan pertanggungjawaban tersebut. Serta kurangnya rasa kepedulian antar anggota di dalam struktur keanggotaan Bumdes Harapan Berkembang Mejasem Timur membuat semakin susah para anggota untuk berkoordinasi dan bekerjasama dalam proses penyusunan.

PEMBAHASAN

Partisipasi masyarakat memberikan kesempatan dan kewenangan yang lebih luas kepada masyarakat untuk secara bersama-sama memecahkan permasalahan yang ada salah satunya mengenai pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Tanpa adanya partisipasi masyarakat maka keberhasilan pengelolaan Bumdes tidak dapat terlaksana dengan baik (Zeyn & Nia Nuraeni, 2023). Teori Cohen dan Uphoff yang mengemukakan tentang adanya empat macam kegiatan yang menunjukkan partisipasi masyarakat di dalam kegiatan pengelolaan, yaitu partisipasi dalam perencanaan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam *Benefit* (pemanfaatan hasil-hasil), dan partisipasi dalam evaluasi. Proses partisipasi atau peran aktif masyarakat Desa Mejasem Timur Kabupaten Tegal dalam pengelolaan Bumdes Harapan Berkembang Kabupaten Tegal sesuai dengan empat tahapan Teori Cohen dan Uphoff.

Pertama, partisipasi dalam perencanaan. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan Bumdes Harapan Berkembang sangat penting dilakukan agar keputusan-keputusan atau kebijakan yang diambil sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui adanya kebebasan bagi masyarakat untuk memberikan usulan, ide-ide, atau gagasan mengenai penggunaan dana desa bagi kegiatan pembangunan dengan cara melalui rapat atau musyawarah yang diadakan antara pengelola Bumdes, pemerintah terkait, dan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan mengenai pengelolaan Bumdes Harapan Berkembang masih belum optimal, karena pada saat pengurus Bumdes berupaya untuk mengundang masyarakat untuk berdiskusi, masyarakat tidak hadir dan berpartisipasi secara langsung dalam perencanaan mengenai pengelolaan Bumdes, selain itu ide/gagasan dari masyarakat masih belum dapat tergali karena masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui mengenai Bumdes dan peruntukannya.

Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan Bumdes lebih menekankan kepada keterlibatan masyarakat secara langsung. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam bentuk unit usaha yang ada di Bumdes Harapan Berkembang antara lain peternakan kambing, sewa ruko, sembako murah, pengelolaan sampah. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan Bumdes dapat dikatakan belum optimal, dikarenakan dengan semua upaya yang dilakukan oleh pengurus Bumdes, tanggung jawab masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut menjadi berkurang. Hal ini juga disebabkan masih kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan Bumdes, bahwa dengan adanya pengurus bukan berarti masyarakat lepas tangan terhadap pengelolaan Bumdes. Hal ini menyebabkan kurangnya masyarakat yang memberikan sumbangan baik berupa tenaga, keahlian, atau keterampilan pada saat pelaksanaan kegiatan program pengelolaan Bumdes berlangsung.

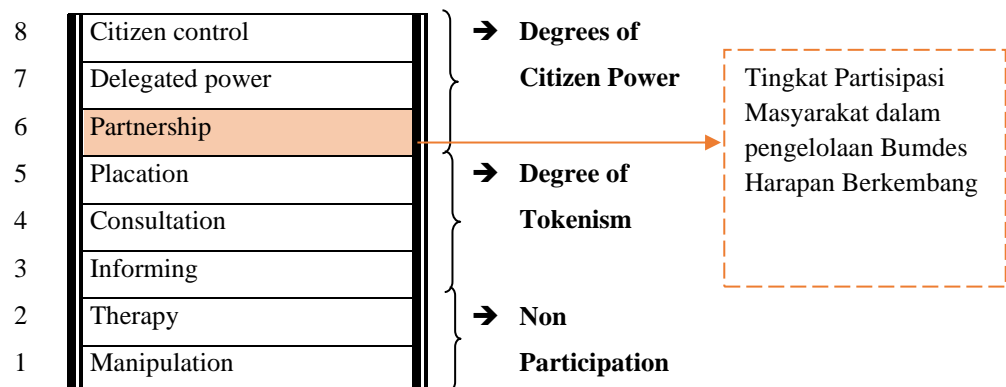
Ketiga, partisipasi dalam *Benefit* (pemanfaatan hasil-hasil pengelolaan). Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan dapat dilakukan dalam bentuk menggunakan, memanfaatkan, menjaga, serta memelihara hasil-hasil pembangunan yang dibiayai oleh dana desa agar dapat bertahan lama dan tidak mudah rusak. Partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan hasil-hasil pengelolaan Bumdes masih belum optimal. Hal ini dikarenakan masyarakat masih belum dapat memanfaatkan hasil-hasil pengelolaan Bumdes secara bijak yang disebabkan masih kurangnya pemahaman masyarakat akan manfaat pengelolaan Bumdes. Selain itu masih kurangnya kepedulian masyarakat untuk memelihara hasil-hasil pengelolaan sehingga hasil-hasil pengelolaan Bumdes tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan dalam jangka waktu yang panjang.

Keempat, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi pengelolaan Bumdes ini lebih ditekankan kepada mengawasi dan mengontrol setiap proses pelaksanaan.

Evaluasi pengelolaan Bumdes Harapan Berkembang dilaksanakan secara koordinasi terbatas dan kondisional oleh pengurus Bumdes dan pemerintah desa untuk membahas hasil-hasil pengelolaan Bumdes yang sudah dilaksanakan. Tim pengabdian masyarakat Politeknik Harapan Bersama menyarankan untuk membuat laporan kegiatan pengelolaan Bumdes dan memaparkan pada Musyawarah Desa dengan pendampingan tim pengabdian masyarakat. Pada proses evaluasi pengelolaan, selain membahas hasil-hasil pengelolaan, masyarakat diberikan kebebasan untuk melakukan penilaian terhadap hasil-hasil pembangunan tersebut baik dalam bentuk saran, kritik, atau pengaduan. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi pengelolaan Bumdes Harapan Berkembang dapat dikatakan cukup optimal, karena sejak awal pengelolaan Bumdes masyarakat kurang berpartisipasi, namun setelah adanya kegiatan Musyawarah Desa, masyarakat sudah mulai sadar dan memberikan penilaian terhadap hasil-hasil pengelolaan Bumdes.

Menurut Arnstein, partisipasi baru benar-benar terjadi bila memiliki kadar kedaulatan rakyat yang cukup dan kadar kedaulatan rakyat tertinggi adalah terjadinya kontrol sosial (*social control and citizen control*) dimana keputusan penting dan pengendali pembangunan ada di tangan rakyat. Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa berada pada tingkat partisipasi Kekuatan masyarakat (*Degrees of Citizen Powers*) atau Kerjasama (*Partnership*) yaitu Bumdes Harapan Berkembang telah mencapai *citizen power*, sehingga pada level ini terbentuknya kerjasama multipihak dalam merumuskan atau melaksanakan kebijakan dan program. Setelah adanya program pengabdian masyarakat dari Politeknik Harapan Bersama dan pendampingan Musyawarah Desa, masyarakat sudah mulai memahami dan berpartisipasi dalam pengelolaan Bumdes. Hasil wawancara dengan Kepala Desa mendukung hasil penelitian, bahwa

“Adanya pendampingan dari Politeknik harapan Bersama untuk melakukan sosialisasi, penyusunan laporan keuangan Bumdes, dan musyawarah desa terkait pembahasan Bumdes, masyarakat sudah mulai berpartisipasi.”



Gambar 1. Tangga Partisipasi Arnstein pada Bumdes Harapan Berkembang
 Sumber gambar: data diolah (2023)

KESIMPULAN

Setelah dianalisis dengan Teori Cohen dan Uphoff yang menunjukkan partisipasi masyarakat di dalam kegiatan pengelolaan, yaitu partisipasi dalam perencanaan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam Benefit (pemanfaatan hasil-hasil), dan partisipasi dalam evaluasi, dapat diketahui partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan Bumdes berada pada tingkat partisipasi Kekuatan masyarakat (*Degrees of Citizen Powers*) atau Kerjasama (*Partnership*) yaitu Bumdes Harapan Berkembang telah mencapai *citizen power*, sehingga pada level ini terbentuk kerjasama multi pihak dalam perumusan atau implementasi kebijakan dan program. Menurut Arnstein, partisipasi baru benar-benar terjadi bila memiliki kadar kedaulatan rakyat yang cukup dan kadar kedaulata rakyat tertinggi adalah terjadinya kontrol sosial (*social control and citizen control*) dimana keputusan penting dan pengendali pembangunan ada di tangan rakyat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak atas bantuan dan dukungannya dalam pelaksanaan kegiatan penelitian ini. Terima kasih khusus kepada Tim Jurnal Owner yang membantu menerbitkan ulasan penelitian. Kemudian terima kasih juga kami haturkan kepada P3M Politeknik Harapan Bersama yang menjadi penyedia finansial kegiatan ini.

REFERENSI

- Abras, A., Fava, A. C. P. e., & Kuwahara, M. Y. (2021). Women Heads of State and Covid-19 Policy Responses. *Feminist Economics*, 27(1–2), 380–400.
- Agustin, M. W., & Mustoffa, A. F. (2023). Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Desa Puhpelem). *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(3).
- Ali, I. I., Sutarna, I. T., Abdullah, I., Kamaluddin, K., & Mas'ad, M. (2019). Faktor Penghambat Dan Pendukung Badan Usaha Milik Desa Pada Kawasan Pertambangan Emas Di Sumbawa Barat. *Sosiohumaniora*, 21(3), 349–354.
- Aprilia Theresia. (2014). *Pembangunan Berbasis Masyarakat: Acuan Bagi Praktisi, Akademisi, dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: Alfabeta.
- Harfis, H., Sopyan, S., & Afrizal, D. (2019). Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. *Jurnal Administrasi Publik Dan Bisnis*, 1(2), 30–37.
- Hendrawati, E., & Mira Pramudianti. (2020). Partisipasi, Transparansi dan Akuntabilitas Perencanaan dan Penganggaran Dana Desa. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 12(2), 100–108.
- Josie Geraldny Meray, Sonny Tilaar, & Esli D Takumansang. (2016). Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Pariwisata Pantai Mahembang Kecamatan Kakas. *Spasial*, 3(3), 47–55.
- Maros, A., Sunaryo, J., & Hidayat, N. Al. (2020). Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan. *Sinamu*, 2(1), 1–6.
- Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pen.* 1–5.
- Savitri, E., Andreas, Volta Diyanto, & Tatang Ary Gumanti. (2022). Accountability of Village Fund Management in Riau Province. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 14(2), 131–138.
- Soetomo. (2018). Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat. In *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Manajemen*. CV. Alfabeta.
- Tiballa, R. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Desa Swarga Bara Kabupaten Kutai Timur. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 2017(1), 445–456.
- Zeyn, E., & Nia Nuraeni. (2023). The Effect of Budgeting Participation and Organizational Commitment on The Performance of Local Government Institutions. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 15(1), 121–128.